



**PENETAPAN**

**Nomor 366/Pdt.P/2015/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Sarman bin Dg. Rafi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**Murni binti M. Dg. Ngusi**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 366/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 23 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 1992 di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Lili, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi wali adalah M. Dg. Usi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Syarifuddin
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi

*Salinan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 1 dari 8 Hal*



perkawinan

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai orang anak
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Sarman bin Dg. Rafi) dengan Pemohon II (Murni binti M. Dg. Ngusi) yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 1992, di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 23 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arwin bin M. Dg. Usi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006, Kelurahan

*Salinan Penetapan Nomor 366 /Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 2 dari 8 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tammua, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 1992, di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Kr. Sese, yang bertindak sebagai wali nikah adalah M. Dg. Usi pemohon II, maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat, yang menjadi saksi nikah adalah Anwar dan Syarifuddin;
  - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Sofyan bin Amir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 1992, di Jalan Kande 3 Lr. 2, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Kr. Sese, yang bertindak sebagai wali nikah adalah M. Dg. Usi pemohon II, maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat, yang menjadi saksi nikah adalah Anwar dan Syarifuddin;
  - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Salinan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 3 dari 8 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dengan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dengan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa

*Salinan Penetapan Nomor 366 /Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 4 dari 8 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Agustus 1992, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Sarman bin Dg. Rafi dengan seorang perempuan yang bernama Murni binti M. Dg. Ngusi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Anwar dan Syarifuddin lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Kr. Sese dan yang menjadi wali adalah M. Dg. Usi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dengan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi telah dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1992, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Anwar dan Syarifuddin, dinikahkan oleh Imam yang bernama Kr. Sese dan yang menjadi wali adalah M. Dg. Usi.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Sarman bin Dg. Rafi berstatus perjaka dan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi telah dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1992, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Anwar dan Syarifuddin, dinikahkan oleh Imam

Salinan Penetapan Nomor 366 /Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 5 dari 8 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Darwis dan yang menjadi wali adalah Dg. Hamid dari pemohon II.

- Bahwa, pemohon I Sarman bin Dg. Rafi berstatus perjaka dan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Sarman bin Dg. Rafi dan pemohon II Murni binti M. Dg. Ngusi tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 04 Agustus 1992 di Jalan Rappokalling Raya Lr. Kita 3 RT. 002 Rw. 006. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-

*Salinan Penetapan Nomor 366 /Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 6 dari 8 Hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Sarman bin Dg. Rafi) dengan pemohon II (Murni binti M. Dg. Ngusi) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1992 di Jalan Tinumbu.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Sarman bin Dg. Rafi) dan pemohon II (Murni binti M. Dg. Ngusi) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 *Hijriyah*. oleh Dra. Hj. Aminah., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Dra. Hanisang. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

ttd

**Dra. Hj. Aminah., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hanisang**

Salinan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 7 dari 8 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

### Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (**Sarman bin Dg. Rafi**) atas permintaannya sendiri pada tanggal 01 Desember 2015.

Salinan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 8 dari 8 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)